

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yang mana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal, dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Sasaran strategis tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan;
- b. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai;
- c. Terwujudnya Transportasi yang lancar
- d. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024.

Adapun dasar dalam Penyusunan LKJIP 2024 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

2. KONDISI ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022

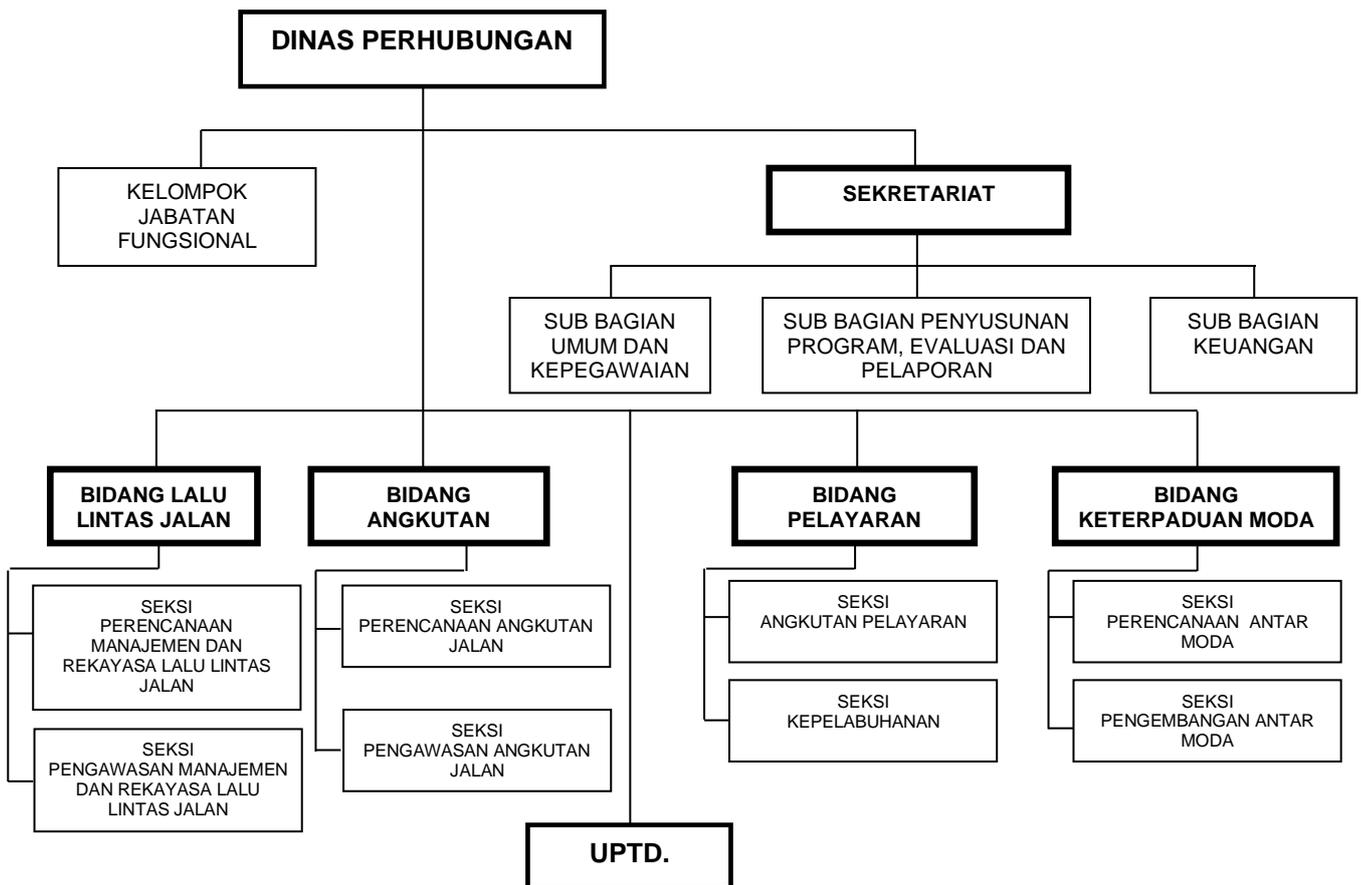
dan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

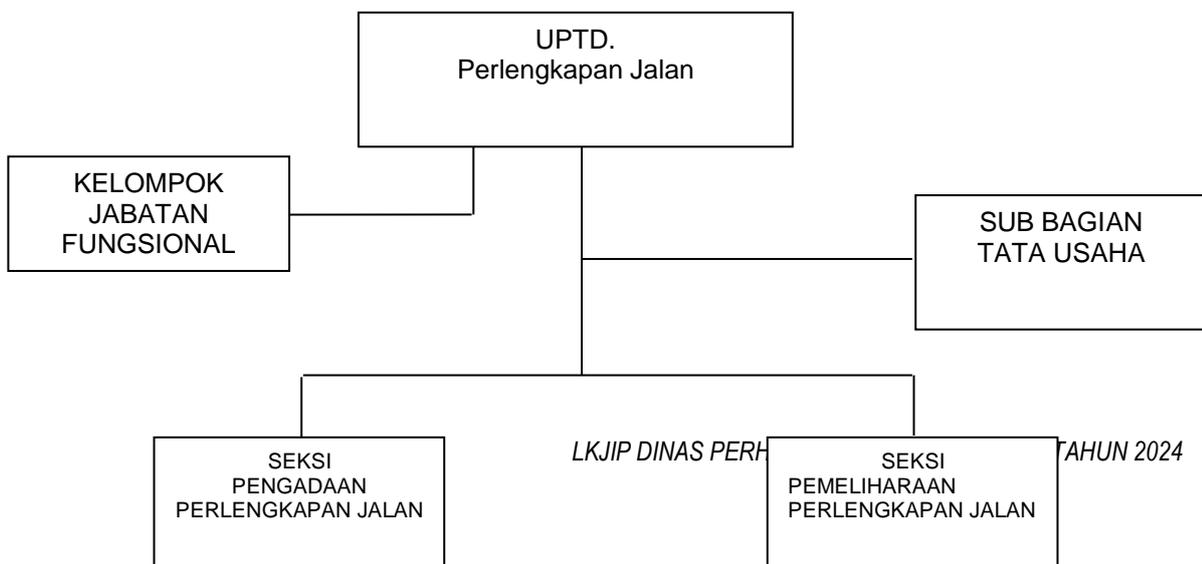
- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Pelayaran;
 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - e. Bidang Keterpaduan Moda, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Antar Moda;
 2. Seksi Pengembangan Antar Moda;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

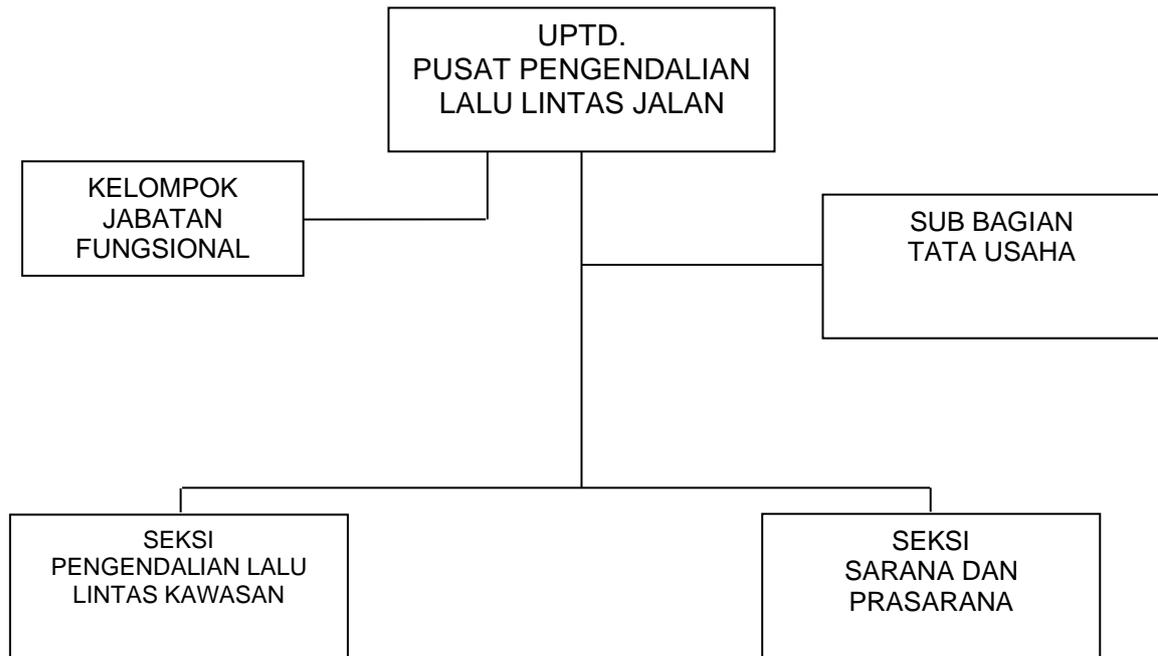
Secara lengkap diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut :



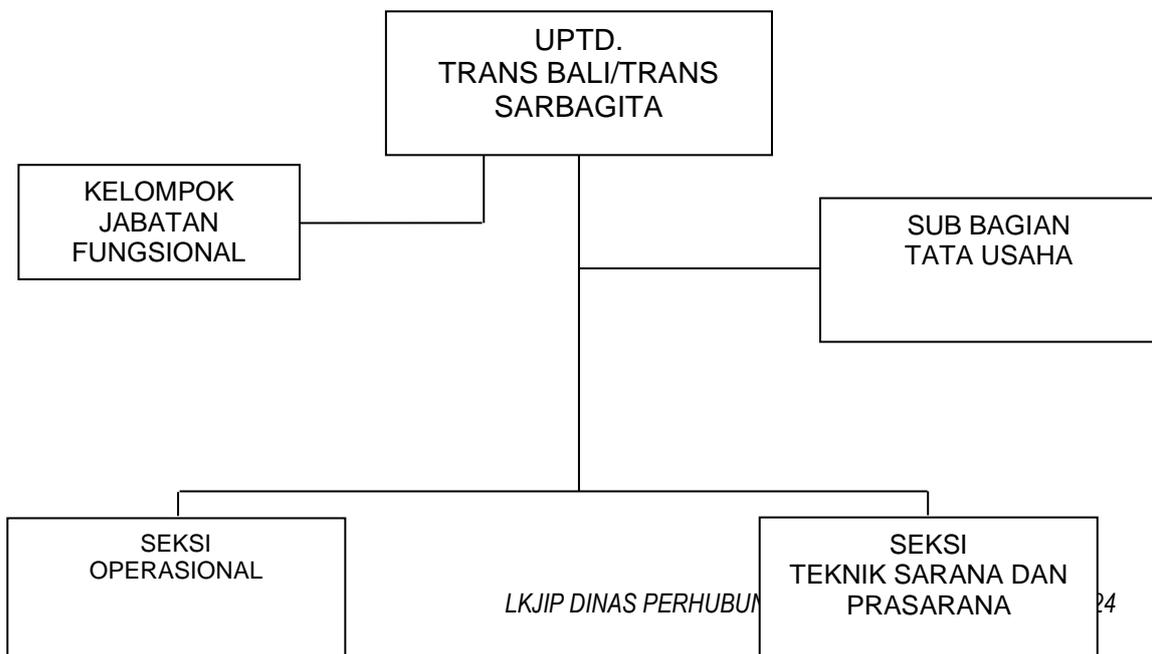
A. UPTD. PERLENGKAPAN JALAN



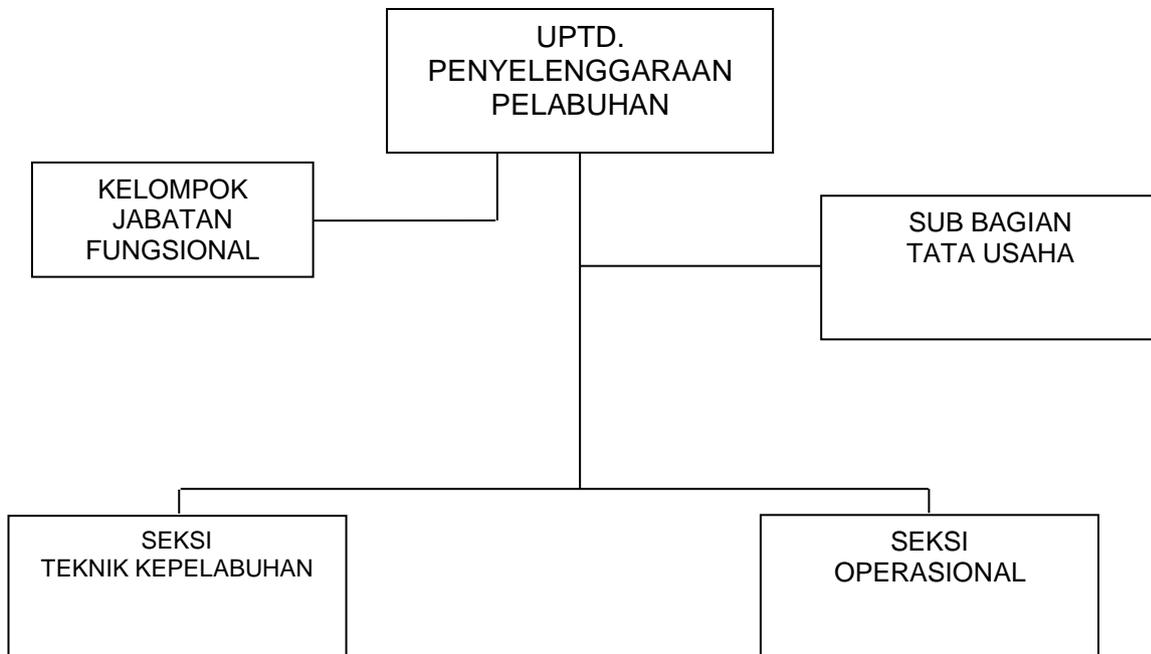
B. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD. TRANS SARBAGITA



D. UPTD. PENYELENGGARA PELABUHAN



b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Rincian Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu Strategis (STRATEGIC ISSUED)

- a. Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali,
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum,
- d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal);
- e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2025-2045, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, peningkatan daya saing daerah serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan dalam persaingan global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada akhirnya hal ini berimplikasi terhadap kebijakan pada perangkat daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan beserta turunannya.

Berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan terpilih dan dilantiknya Gubernur Bali periode 2025 – 2030, memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan yang mendasar menjadikan *entry point* telah disusun dan ditetapkan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dengan Perda No. 3 tahun 2019. Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2018 -2023

sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses menuju kearah yang lebih baik.

VISI DAN MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2018 - 2023 yaitu “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ”, dengan 3 (tiga) utama yaitu Alam Bali, Krama Bali (Manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam mempercepat pencapaian Visi diatas, juga dijabarkan kedalam Misi yang mengidentifikasi cara – cara untuk mewujudkan Misi. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023 terdapat 22 Misi yang didelegasikan kepada OPD sesuai Tupoksi.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023 mengacu pada **Misi Ke-18 ”Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali”**. Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuangkannya kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal ”

Sasaran : Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang Lancar

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Sasaran : Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) apabila dalam penyelenggaraan transportasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing akan dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi.

Dengan demikian, misi tersebut secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

2. **PERJANJIAN KINERJA 2024**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.86
	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73
	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan	82.5
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	38.58
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2024, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75
		Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.86
		Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75
2	Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	73
		Indeks Kepuasan Layanan Angkutan	82.5
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
3	Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	38.58
4	Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85

2. Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2024

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target di tahun 2024 dapat digambarkan sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024
1	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	75
		Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.84	0.86
		Persentase Aksesibilitas Pelayaran		75
2	Terwujudnya transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65	65
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72.61	73
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	82.5
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50
3	Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik		38.58
4	Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	83.85

B. ANALISIS

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2024 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sasaran Pertama “Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7

Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75	75	Program : Pengelolaan Perkeretaapian	Kegiatan : Penetapan Recana Induk Perkeretaapian	100%
--	---	----	----	--------------------------------------	--	------

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian yang diampu oleh Bidang Keterpaduan Moda yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dengan mewujudkan Infrastruktur Perhubungan yang memadai. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

➤ Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian pada Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 472.437.140,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 453.934.073,00 (96.08%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan komitmen pembiayaan}}{\text{Lintasan wilayah Sarbagita}} \times 100\%$$

1.2. Sasaran Kedua “Terwujudnya Transportasi yang lancar”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%	65%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : (1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, (2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, (3) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	100%
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,86	0,86	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%

				Jalan		
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	82,5	82,5	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1.2) tahun 2024 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh UPTD dan Bidang yang terdiri dari UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pengawasan, koordinasi, penataan dan pemeliharaan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali dapat terehabilitasi dan terpelihara. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 566.282.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 448.051.315,00 (95.59%), serta realisasi fisik (100%).
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, dengan Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar meningkatkan kelancaran pengguna jaringan jalan. Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi pada tahun 2024 dengan anggaran

sebesar Rp. 1.505.149.130,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.411.504.487,00 (93.78%), serta realisasi fisik (100%).

Target Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Bali yang berbasis ATCS dijabarkan dengan pedoman sebagai berikut:

- 1) Sesuai PM Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan tertuang pada tabel sbb:

Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan

Tingkat Pelayanan	Tundaan (Delay) (det/kend)
A	$\leq 5,0$
B	5,1 – 15
C	15,1 – 25
D	25,1 – 40
E	40,1 – 60
F	≥ 60

- **Tingkat Pelayanan A** : pergerakan yang lancar/sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau.
 - **Tingkat Pelayanan B** : pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A.
 - **Tingkat Pelayanan C** : pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini.
 - **Tingkat Pelayanan D** : pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun.
 - **Tingkat Pelayanan E** : pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi, biasanya menunjukkan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi.
 - **Tingkat Pelayanan F** : kondisi macet total atau ketika arus kedatangan melebihi kapasitas dari persimpangan tersebut.
- 2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- 1) Menurut pasal 93 ayat 1 menyebutkan bahwa :
- a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 1. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 2. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 3. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 4. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 5. Pemaduan berbagai moda angkutan;
 6. Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 7. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 8. Perlindungan terhadap lingkungan.
 9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan;
 2. Pengaturan;
 3. Perekayasaan;
 4. Pemberdayaan; dan
 5. Pengawasan.

Adapun data penunjang dalam perhitungan lalu lintas harian rata-rata pada jaringan jalan Provinsi Bali Tahun 2024 mengetahui karakteristik pada jalan Provinsi yang telah disebutkan diatas sesuai pedoman PM Nomor 96 Tahun 2015.

**Rekapitulasi Perhitungan Lalu lintas Harian Rata-rata
Pada Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023**

I. NEGERA										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	0	2	12K	JLN.DR.SUTOMO - GATOT SUBROTO (NEGERA)	0,78	760	3164,89	0,24	B
2	0	0	3	12K	JLN. NGURAH RAI (NEGERA)	2,01	876	5896,28	0,15	A
3	0	7	5		BTS. KOTA NEGERA - PENGAMBENGAN	3,97	1136	1946,49	0,58	C
4	0	7	5	11k	JLN. DANAU BUYAN - BTS.KOTA NEGERA	2,75	649	2426,14	0,27	B
5	0	7	6		SIMP. RAMBUTSIWI - PURA RAMBUTSIWI	0,79	126	2792,79	0,05	A
6	0	8	7		PENGAMBENGAN - CUPEL - BANYUBIRU	6,30	898	2736,37	0,33	B

II. TABANAN										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	0	5	12k	JLN. GAJAH MADA - P. MENJANGAN - P. BATAM (TABANAN)	2,00	1447	3032,68	0,48	C
2	0	0	5	13K	JLN. P. SERIBU (TABANAN)	0,30	714	2881,14	0,25	B
3	0	0	6	12K	JLN. GAJAH MADA (TABANAN)	0,47	1621	2445,62	0,66	C
4	0	0	6	13K	JLN. PAHLAWAN - G.SEMERU (TABANAN)	1,09	2071	3129,72	0,66	C
5	0	0	6	14K	JLN. GATOT SUBROTO (TABANAN)	1,15	1958	2883,56	0,68	C
6	0	0	6	15K	JLN. NGURAH RAI (TABANAN)	0,97	1936	3129,72	0,62	C
7	0	5	8		BTS.KEDIRI - TANAH LOT	7,54	2072	3300,88	0,63	C
8	0	5	8	11K	JLN. HUSNI THAMRIN (TABANAN)	0,52	749	2454,30	0,31	B
9	0	5	8	12K	JLN. IMAM BONJOL (TABANAN)	0,66	2373	2859,03	0,83	D
10	0	5	8	13K	JLN. TEUKU UMAR - BTS.KEDIRI	0,93	1945	2507,92	0,78	D
11	0	5	8	14K	JLN. WAGIMIN KEDIRI (TABANAN)	0,70	553	2539,92	0,22	B
12	0	7	3		BTS. KEDIRI - BELAYU - MENGWI	4,06	1534	1946,49	0,79	D
13	0	7	3	11k	JLN. KAPTEN TENDEAN (TABANAN)	1,70	977	1404,44	0,70	C
14	0	7	3	12K	JLN. RAYA ALAS KEDATON - BTS. KEDIRI	0,50	855	1450,23	0,59	C
15	0	7	7	11K	JLN. GUNUNG BATUR (TABANAN)	0,09	614	2445,62	0,25	B
16	0	7	7	12K	JLN. GUNUNG AGUNG (TABANAN)	1,51	1129	2110,74	0,53	C
17	0	8	9		SP.PETANG - BATUNYA	10,97	369	2049,3	0,18	A
18	0	9	1		SP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9,80	3226	2567,11	1,26	F

III. DENPASAR										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	5	9	11K	JLN. RAYA PUPUTAN NITIMANDALA (DPS)	3,34	3475	3681,45	0,94	E
2	0	5	9	12K	JLN. COK AGUNG TRESNA NITIMANDALA (DPS)	2,15	3840	3930,85	0,98	E
3	0	5	9	13K	JLN. BASUKI RAHMAT NITIMANDALA (DPS)	0,35				
					Arah : Timur - Barat		322	2739,69	0,12	A
					Arah : Barat - Timur		426	2739,69	0,16	A
4	0	5	9	14K	JLN. DR. MUARDI NITIMANDALA (DPS)	0,28	834	2753,26	0,30	B
5	0	5	9	15K	JLN. TANTULAR NITIMANDALA (DPS)	0,63	1981	2952,26	0,67	C
6	0	5	9	16K	JLN. D.I. PANJAITAN NITIMANDALA (DPS)	0,63	853	2229,32	0,38	B
7	0	5	9	17K	JLN. KUSUMAATMAJA NITIMANDALA (DPS)	0,64	2205	3516,54	0,63	C
8	0	5	9	18K	JLN. IR. JUANDA NITIMANDALA (DPS)	0,64	1404	3305,28	0,42	B
9	0	5	9	19K	JLN. PROF. MOCH. YAMIN NITIMANDALA (DPS)	0,80	3753	4198,87	0,89	E
10	0	5	9	1AK	JLN. CUT NYAK DIEN NITIMANDALA (DPS)	0,20	985	2347,90	0,42	B
11	0	5	9	1BK	JLN. S. PARMAN NITIMANDALA (DPS)	0,21	1137	2347,90	0,48	C
12	0	5	9	1CK	JLN. TANTULAR BARAT NITIMANDALA (DPS)	0,72	671	3516,54	0,19	A

IV. BADUNG										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	6	3	1	BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG	27,72	2528	2567,11	0,98	E
2	0	6	8		MAMBAL - KENGETAN	3,40	2756	2482,48	1,11	F
3	0	8	9		SP.PETANG - BATUNYA	10,97	369	2049,3	0,18	A
4	0	9	1		SP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9,80	3226	2567,11	1,26	F

V. KLUNGKUNG										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	4	1	11K	JALAN NGURAH RAI (SEMARAPURA)	1,34	880	2648,11	0,33	B
2	0	5	5	11K	JLN. PUPUTAN - BTS. KOTA SEMARAPURA	1,09	1274	2244,60	0,57	C
3	0	5	6	11K	JLN. KECUBUNG (SEMARAPURA)	0,86				
					Arah : Denpasar - Semarapura		402	2513,81	0,16	A
					Arah : Semarapura - Denpasar		464	2513,81	0,18	A
4	0	5	6	12K	JLN. RAMA (SEMARAPURA)	1,50	740	3164,63	0,23	B

VIII. GIANYAR										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	6	8		MAMBAL - KENGETAN	3,40	2756	2482,48	1,11	F
2	0	4	3		SEMEBAUNG - BEDAHULU	2,03	2132	2482,48	0,86	E
3	0	6	0		BLAHBATUH - BONE - BTS. KOTA GIANYAR	3,96	2176	2482,48	0,88	E
4	0	6	0	11K	JLN. ASTINA SELATAN (GIANYAR)	0,65	1120	2110,74	0,53	C
5	0	6	0	12K	JLN. KESATRIAN (GIANYAR)	0,80	809	2110,74	0,38	B
6	0	6	4		TEGALTAMU - KEDEWATAN	14,35	2650	2482,48	1,07	F
7	0	6	5		KEDEWATAN - UBUD	2,90	1586	2567,11	0,62	C
8	0	6	6		KEDEWATAN - PAYANGAN - BATURANYAR	30,66	1869	1821,60	1,03	F
9	0	9	0		BURUAN - GIANYAR	2,73				
					Arah : Buruan - Gianyar		852	3168,00	0,27	B
					Arah : Gianyar - Buruan		825	3168,00	0,26	B
10	0	9	2		KETEWEL - SUKAWATI	4,02	2177	2482,48	0,88	E

IX. BANGLI										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	4	4	11K	JLN. MERDEKA (BANGLI)	3,50	1260	2765,80	0,46	C
2	0	4	6	11K	JLN. NUSANTARA (BANGLI)	1,71	985	2426,14	0,41	B
3	0	4	7	11K	JLN. KUSUMAYUDA (BANGLI)	1,27	679	2426,14	0,28	B

Perhitungan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

$$\text{Derajat Kejenuhan (DS)} = V/C$$

Ket : V = volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

smp = satuan mobil penumpang

Sesuai data pada tabel tersebut diatas, ruas jalan provinsi yang telah dihitung tingkat pelayanannya. Bila dirata – ratakan maka pencapaian kinerja ruas jalan sesuai tabel diatas masuk kategori C atau sesuai target dimana keadaan jalan arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan di sekitar jalan Provinsi, semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan infrastruktur kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan dan perhotelan. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

No	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Ket
20	KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana	KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK)
21	KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana	
22	KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	
23	KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli	
24	Kawasan Pengembangan dan Sekitarnya di Kabupaten Jembrana	KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)
25	Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana	
26	Kawasan Mengwi dan Sekitarnya di Kabupaten Badung	
27	Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Sekitarnya di Kabupaten Klungkung	
28	Kawasan Kubutambahan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
29	Kawasan Celukan Bawang dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
30	Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan	KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan
31	Kawasan Tempat Suci Pura Luwur Uluwatu di Kabupaten Badung	
32	Kawasan Tempat Suci Pura Puncak Mangu di Kabupaten Badung	
33	Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar	
34	Kawasan Tempat Suci Pura Ketel Bumi di Kabupaten Klungkung	
35	Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
36	Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli	
37	Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem	
38	Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang di Kabupaten Karangasem	
40	Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih	KSP Kawasan Warisan Budaya
41	Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun	
42	Kawasan Warisan Budaya DAS Tukad Pekerisan	
43	Kawasan Warisan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	
44	Kawasan Danau Batur dan Sekitarnya di Kabupaten Bangli	
45	Kawasan Danau Beratan - Buyan - Danau Tamblingan dan Sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	

Sumber : No 3 Tahun 2020 tentang RTRWP

b. Rasio konektivitas layanan angkutan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi rasio konektivitas layanan angkutan dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pemantauan dan sosialisasi. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 341.431.440,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 328.537.990,00 (97,87%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Rasio konektivitas layanan angkutan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KSP yang terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah KSP yang harus dilayani}}$$

c. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Pelayaran dan UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Persentase Aksesibilitas Pelayaran dan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditargetkan yakni Studi Amdal Pelabuhan Sangsit pada Bidang pelayaran juga mengawasi, membina dan mengendalikan jaringan trayek pelayaran dengan menggunakan perhitungan target dibandingkan dengan realisasinya, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini target sasaran yaitu jaringan pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan sebanyak 20 (dua puluh) jaringan dapat terealisasi bahkan melebihi. Dari target tersebut tercapai output sebanyak 20 (dua puluh) jaringan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Bidang Pelayaran juga melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut, dimana dalam pelaksanaan kegiatan sasaran yang dicapai melebihi target,

dimana Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diawasi dan dibina sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan. Pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 871.047.840,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 853.040.800,00 (97.93%), serta realisasi fisik (100%).

- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 139.567.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.541.158,00 (82.07%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional}} \times 100\%$$

d. Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali

Program ini diampu oleh UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan.

Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk penyediaan Angkutan Umum salah satunya Bus Sarbagita yang memiliki 2 koridor. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 11.018.971.867,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.308.318.596,00 (48.17%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali” dari Skor indeks kepuasan hasil survey terhadap penumpang angkutan umum.

Transportasi angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan angkutan umum dimana pangsa pasar angkutan umum masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum juga karena kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Disamping itu pula, pelayanan angkutan umum masih sangat buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan bebas hambatan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan *underpass* Simpang Dewa Ruci yang diharapkan sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi kemacetan di wilayah Bali Selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), maka permasalahan transportasi (baca kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi wilayah tersebut.

Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep Terciptanya Lalu Lintas Yang Efisien khususnya di wilayah perkotaan atau aglomerasi SARBAGITA melalui peningkatan angkutan umum massal.

Hal ini sesuai dengan amanat :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 139 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan barang. Penyediaan *Public Transport* (AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan/Perdesaan) yang *akuntable* menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-undang sebelumnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tugas

pemerintah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (publik) melalui program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan SARBAGITA.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tgl 31 Desember 2018 tentang layanan gratis angkutan umum Trans Sarbagita untuk pelajar/mahasiswa.
- MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali dan Walikota / Bupati di wilayah SARBAGITA tanggal 2 Desember 2010 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA.
- MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepala Daerah di Wilayah SARBAGITA tanggal 21 Mei 2019 tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pengoperasian angkutan umum Trans SARBAGITA yang telah di launching pada Bulan Agustus 2011 berlanjut hingga saat ini, dan dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” akan terus memberikan pelayanan terbaik pada sector transportasi darat sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan mampu berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan, meningkatkan keselamatan, penghematan BBM untuk mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Handal (Aman, Nyaman, Tertib, Lancar, Efisien dan Terjangkau).

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah disiapkan langkah-langkah sebagai misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sebagai implimentasi dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Misi kedua adalah Mengoptimalkan Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pembatasan penggunaan pribadi dan mampu memberikan prioritas bagi penggunaan angkutan umum.

Misi ketiga adalah Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan visi dan misi tersebut diatas diharapkan mampu mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masyarakat mau beralih menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sehingga dapat turut berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

Kinerja dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah Prosentase pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang ditarget sebesar 82.5%, dimana pada tahun 2022 Prosentase layanan yang baru dapat disediakan adalah sebesar 72,5%. Selain itu indikator lain yakni Load Factor penumpang juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan. Dengan faktor muat bus (Load Factor) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penumpang dan perkapasitas yang disediakan maka dapat dipantau efektivitas layanannya apakah naik atau turun. Dalam load faktor idealnya berada diatas 70% .

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 9 unsur penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 110 orang diperoleh nilai IKM sebesar 81.91 yang menunjukkan kinerja angkutan umum Trans Sarbagita masih tergolong SEDANG sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pengolahan Data SKM menggunakan excel template oleh data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	PERNYATAAN	NILAI RATA-RATA	MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI
1	Informasi jurusan angkutan umum Trans SARBAGITA sudah jelas dan terpasang dengan baik	3.35	53.66	A
2	Prosedur pelayanan bus mudah dan sesuai untuk penumpang	3.34	83.41	A
3	Waktu tempuh perjalanan angkutan Trans SARBAGITA sudah ideal	3.35	83.64	A
	Layanan Operasional angkutan Trans SARBAGITA sudah sesuai jadwal	3.35	83.64	A
	Waktu pelayanan antar bus sesuai kebutuhan penumpang	3.35	83.86	A
4	Tarif angkutan umum Trans SARBAGITA sudah sesuai dan terjangkau	3.33	83.18	A
5	Kondisi didalam Bus sangat nyaman	3.27	81.82	A
6a	Pengemudi hanya menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte yang telah di tentukan	3.26	81.59	A

6b	Pramudi menjalankan bus dengan baik dan tertib lalu lintas	3.25	81.36	A
7	Pramujasa sudah melakukan tugasnya dengan baik dan ramah	3.27	81.82.	A
8	Informasi layanan pengaduan, sarana dan masukan telah tersedia	3.14	78.41	B
9	Kondisi halte sangat baik dan sesuai pernyukannya	3.15	78.86	B
	Ketersediaan halte sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna	3.17	79.32	B
	RATA-RATA	3.28	81.91	A

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan angkutan umum Trans Sarbagita mendapat nilai **SANGAT BAIK**

Perkembangan kinerja operasional Angkutan Umum Trans SARBAGITA berdasarkan jumlah penumpang rata-rata per-hari dari tahun ke tahun tahun 2016 dengan pencapaian tertinggi yang mencapai 2.374 orang.

TABEL
JUMLAH PENUMPANG PER HARI

TAHUN	KORIDOR I	KORIDOR II	TOTAL
2011	(belum ada)	1.411	1.411
2012	915	1.566	2.481
2013	847	1.356	2.203
2014	888	1.361	2.249
2015	782	1.527	2.309
2016	838	1.536	2.374
2017	753	1.307	2.060
2018	451	486	937
2019	538	328	866
2020	180	662	842
2021	553	502	1.055
2022	2.860	852	3.712
2023	3.254	1.047	4.301
2024	75.892	19.175	95.067

Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya penyebaran wabah Corona Virus (Covid-19) di Provinsi Bali dan seluruh dunia. Kebijakan Provinsi Bali terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bali sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Sarbagita salah satunya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dapat mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya Bus Trans Sarbagita. Jika melihat data rekap diatas pada tahun 2021 hingga 2023 situasi sudah mulai membaik, sehingga membuat kenaikan signifikan terutama pada tahun 2021 ke 2022 sebanyak 2657 penumpang. Untuk koridor I dan II yang dikelola oleh UPTD Trans Sarbagita, pada tahun 2023 membukukan capaian *load factor* sebesar 23,85%.

TABEL LOAD FACTOR

TAHUN	LOAD FACTOR
2011	21,92%
2012	26,76%
2013	23,76%
2014	24,27%
2015	24,91%
2016	26,01%
2017	24,36%
2018	55,77%
2019	44,17%
2020	15,37%
2021	32,80%
2022	21,85%
2023	23,85%
2024	25,09%

Hubungan atau dampak dari perhitungan *Load factor* adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kapasitas, karena semakin meningkatnya *Load factor* maka terindikasi kapasitas mendekati maksimal. Bila dilihat dari sudut pandang pendapatan dari penjualan karcis/tiket bus Trans Sarbagita yang merupakan pendapatan dari jenis Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah, apabila kapasitas yang disediakan sama dan terjadi peningkatan Load factor, maka indikasi Pendapatan juga akan meningkat. atau berbanding lurus (pengecualian dari tahun 2019 diberlakukan kebijakan gratis untuk pelajar/mahasiswa).

Pendapatan per-tahun sejak dioperasikan dari tahun 2011 sd 2016 menunjukkan jumlah pendapatan operasional per-tahun yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 merupakan tahun dengan pencatatan pendapatan operasional tertinggi mencapai Rp.2.760.723.500. Namun jika dilihat dari data 3 tahun terakhir (2017, 2018 & 2019) kondisi ini mengalami perubahan dimana pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan dengan pencatatan sebesar Rp.2.350.341.000 menurun pada tahun 2018 tercatat pencapaian sebesar Rp. 1.070.004.500, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 527.200.500 dan penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 112.017.500. Pendapatan Hasil Sewa BMD pada Bus sarbagita pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.025.000.000 dan pendapatan 2023 menurun menjadi Rp. 178.862.100 untuk hasil penjualan tiket bus. Pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 213.531.900, dikarena ditetapkannya tariff baru sesuai Pergub Bali Nomor. 7 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor. 112 Tahun 2018 tentang tariff Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali.

TABEL
TOTAL PENDAPATAN

TAHUN	TOTAL
2011	620.012.500
2012	1.729.459.500
2013	2.543.417.500
2014	2.573.751.500
2015	2.658.709.500
2016	2.760.723.500
2017	2.350.341.000
2018	1.070.004.500
2019	527.200.500
2020	112.017.500
2021	46.704.000
2022	1.025.000.000
2023	178.862.100
2024	213.531.900

Yang menjadi catatan sejak tahun 2023 seluruh koridor layanan angkutan Trans Sarbagita terbagi menjadi 4 layanan, baik sebelum Koridor I (Kota – GWK) dan Koridor II (Kota – Nusa Dua), kemudian tambahan khusus untuk Layanan Angkutan Umum Denpasar – Bangli dan Layanan Pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita yang berjalan mulai bulan Maret 2023. Penentuan tarif pada koridor I, II dan layanan pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita dikenakan Rp 4.400 bagi penumpang umum dan bagi penumpang pelajar dikenakan Rp. 2.000, lalu untuk layanan Angkutan Denpasar – Bangli belum dikenakan biaya tarif (gratis).

1.3. Sasaran Keempat “Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51%	72,51%	Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

Indikator Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan adalah Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan

Indikator kinerja: Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2024 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang terbagi kedalam 2 Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimum angkutan dengan sasaran terwujudnya transportasi yang berkeselamatan

melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi pelaksanaan penerbitan izin dalam penyelenggaraan pada angkutan orang pada setiap trayek lintas baik dari Daerah maupun lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, agar bagi penyelenggara angkutan orang dalam trayek tersebut dapat memenuhi persyaratan perizinan.

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 346.553.980,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 335.716.460,00 (96.87%), serta realisasi fisik (100%).

1.4. Sasaran Keempat “Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85%	83.85%	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Indikator Kinerja dari Sasaran Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Indikator kinerja: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2024 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diampu oleh seluruh Sekretariat maupun UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, yang terbagi pada **Sekretariat** (Sub.Bagian Umum Kepegawaian, Sub.Bagian Keuangan, dan Sub.Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan), dan **UPTD** (Pusat Pengendalian LLAJ, Perlengkapan Jalan, Trans Bali/Trans Sarbagita, dan Penyelenggaraan Pelabuhan) yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang maupun UPTD. pada tahun 2024 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 25.277.010.974,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.522.883.176,00 (93.06%), serta realisasi fisik (100%).

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sesuai dengan kinerja utama Provinsi Bali, terdapat beberapa program prioritas dan unggulan yang menjadi catatan pada tahun 2024. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada tahun 2024 memiliki Program peningkatan layanan angkutan Trans Sarbagita yang masih berlanjut dengan di tetapkannya Peraturan Gubernur Nomor. 7 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Tarif Penumpang Angkuta Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran yang didalamnya terdapat beberapa kajian untuk rencana (Amdal pelabuhan Sangsit).

Keberhasilan program tidak terlepas daripada dukungan dari segenap unsur baik Pemerintah selaku regulator maupun Pengusaha dan Masyarakat pengguna. Perlunya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi sangat penting untuk kesuksesan program ini selain dukungan daripada Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk menunjang program. Adapun beberapa gambaran atas permasalahan maka dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan program Layanan Trans SARBAGITA dengan melihat kondisi layanan maka permasalahannya sebagai berikut:

Hingga akhir tahun 2024 rencana untuk menambah operasional koridor baru belum dapat terealisasi mengingat terbatasnya anggaran, sehingga dampaknya masyarakat masih kesulitan mengakses layanan Trans Sarbagita secara terintegrasi, trayek pengumpan yang

masih tersisa juga tidak berfungsi maksimal, kecenderungan Load Faktor masih rendah, subsidi masih tinggi dan opini buruk terhadap layanan.

➤ Pelaksanaan Program Infrastruktur

Pada tahun 2024 dilakukan pengkajian terhadap rencana infrastruktur transportasi Bali. Beberapa kajian telah dilaksanakan baik pada APBD induk maupun pada APBD Perubahan. Kajian Amdal pelabuhan Sangsit, Yang menjadi catatan dimana dengan selesainya dokumen ini diharapkan adanya dukungan lanjutan dalam perencanaan fisik dan pembangunan kedepan.

➤ Manajemen Rakayasa Lalu Lintas

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan melaksanakan kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan provinsi masih belum maksimal dapat membantu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Dukungan kajian masih dibutuhkan untuk dapat mengevaluasi kinerja ruas jalan serta persimpangan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam merekayasa lalu lintas di Provinsi Bali.

➤ Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban terhadap pelanggaran perijinan angkutan orang dan barang dengan kegiatan pengawasan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi

Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan masih belum efektifnya usaha yang telah dilakukan dan dibutuhkan inovasi agar pengusaha dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap Pemerintah.

Analisis permasalahan dan solusi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan Perhubungan adalah :

1. Masih minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penyediaan angkutan masal di Provinsi Bali.
2. Masih minimnya infrastruktur transportasi publik terintegrasi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari belum terkoneksi dengan baik beberapa simpul transportasi baik darat dan laut.
3. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang masih kurang, meskipun telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi dengan target yang berbeda-beda tetapi masih ada target yang belum bisa tersentuh yang diakibatkan karena keterbatasan anggaran.

4. Fungsi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas belum optimal bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan survey-survey dengan tingkat prioritas lalu lintas berkeselamatan yang diharapkan yaitu *zero accident*.
 5. Belum seragamnya penegakan hukum pelanggaran operasional angkutan barang menyebabkan masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi, tata cara pemuatan maupun daya angkut yang diijinkan.
 6. Penggunaan angkutan umum yang masih rendah.
- a. Solusi yang dapat ditempuh antara lain :
1. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait sinkronisasi perencanaan program di Bidang Transportasi sehingga dapat bersinergi dalam menghasilkan program yang selaras baik dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tertata dari segi penyiapan pendanaan/anggaran. Dengan demikian diharapkan program dapat terbiayai dengan berjalan dengan baik.
 2. Merealisasikan dan atau menindak lanjuti dari kajian Masterplan Transportasi Terintegrasi Provinsi Bali terkait rencana apa yang akan dilakukan kedepan dan dapat menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap.
 3. Perlu sosialisasi dan pertemuan terhadap seluruh stake holder perhubungan sehingga seluruh regulasi dapat dipahami dengan baik.
 4. Diperlukan kajian terhadap Manajemen Rekayasa Lalu Lintas secara menyeluruh di Provinsi Bali sehingga dapat ditentukan prioritas penanganan dan skala pembiayaan. Hingga saat ini keterbatasan SDM juga menjadi hambatan sehingga dibutuhkan SDM yang benar – benar merupakan SDM di Bidang Transportasi Darat.
 5. Perlu adanya keseragaman penerapan sanksi hukum atas pelanggaran operasional angkutan barang dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 antara Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur maka anggaran induk yang dikelola untuk mendukung kinerja dinas pada program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 25.277.010.974,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu	Rp. 15.760.426.203,00	APBD

	Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.010.614.840,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 472.437.140,00	APBD
	Jumlah anggaran	Rp. 42.520.489.157,00	

Sejalan dengan perkembangan anggaran pada tahun 2024 terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran pada perubahan APBD tahun 2024 dikarenakan rasionalisasi dan pengendalian belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 23.899.467.802,00	Rp 25.277.010.974,00	Rp 23.522.883.176,00	93.06%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.208.154.763,00	Rp 15.760.426.203,00	Rp 9.619.707.201,00	61.04%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.010.614.840,00	Rp 1.010.614.840,00	Rp 967.581.958,00	95.74%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 472.437.140,00	Rp 472.437.140,00	Rp 453.934.073,00	96.08%
	Jumlah anggaran	Rp 37.590.674.545,00	Rp 42.520.489.157,00	Rp 34.564.106.408,00	81.29%

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran pada tahun ke-				
2020 (perubahan)	2021 (perubahan)	2022 (perubahan)	2023 (perubahan)	2024 (perubahan)
12.921.291.473	26.895.197.905	30.439.092.618	48.309.852.629	42.520.489.157

Realisasi Anggaran pada tahun ke-				
2020	2021	2022	2023	2024
13.964.825.658	15.215.725.499	29.140.860.463	36.287.151.007	34.564.106.408

Ratio Serapan antara Realisasi dan Anggaran

Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
2020	2021	2022	2023	2024
91,12	92,94	95,73	75,11	81.29

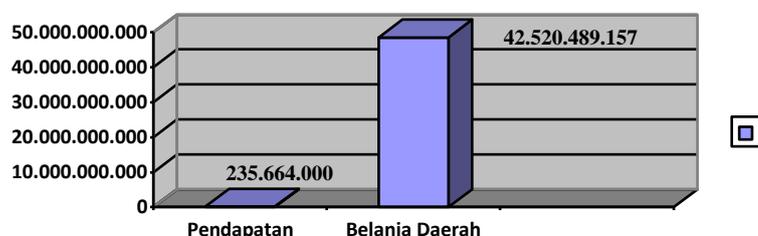
Persentase Pertumbuhan Anggaran

Rata - rata pertumbuhan				
2020	2021	2022	2023	2024
-20,03%	108,15%	13,18%	58,71%	81.29%

Dengan kebijakan anggaran di tahun 2024 dimana Belanja Langsung (BL) di masukan dalam DPA perangkat daerah maka anggaran di Dinas Provinsi Bali mengalami kenaikan. Dengan kebijakan tersebut anggaran sebesar Rp. 42.520.489.157,00 terdiri dari Belanja Langsung. Anggaran yang telah ditentukan oleh Tim Pendapatan dan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali anggaran untuk pelaksanaan kegiatan atau belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai stabil dan mengalami kenaikan hingga pada tahun ini (2024) Dinas Perhubungan Provinsi Bali tetap konsisten melaksanakan seluruh kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi terus dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja tetap dilaksanakan dengan maksimal.

PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2024



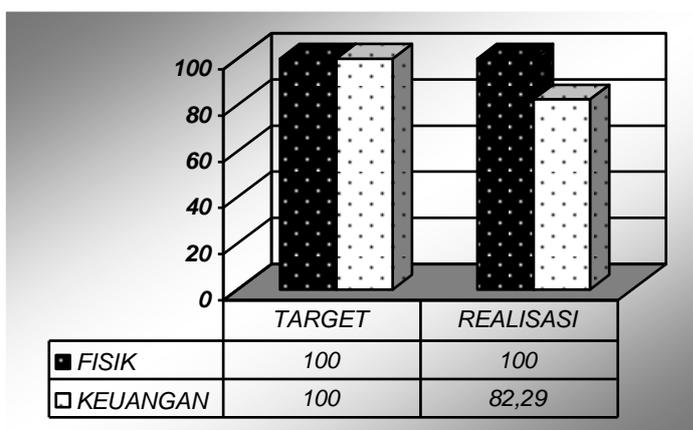
Total Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebesar Rp. 42.520.489.157,00 (terdiri belanja Operasional dan belanja Modal)

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 4 Program yang diampu oleh 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pada tahun 2024 Total Anggaran Belanja yang dikelola sebesar Rp. 42.520.489.157,00 untuk membiayai 4 Program dengan rekapitulasi sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nama Bidang	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Bidang Sekretariat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6	25.277.010.974,00	
2.	Bidang Angkutan Jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	7	15.760.426.203,00	
3.	Bidang Lalu Lintas Jalan				
4.	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				
5.	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita				
6.	UPTD Perlengkapan Jalan				
7.	Bidang Keterpaduan Moda	Pengelolaan Perkeretaapian	1	472.437.140,00.	
8.	Bidang Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran	2	1.010.614.840,00	
9.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan				
Jumlah			16	42.520.489.157,00	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2023



Capaian/realisasi total dari pelaksanaan 4 Program dan 16 Kegiatan

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdiciapai pada akhir tahun (2024). Indikator kinerja masing-masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0.86
	Prosentase Aksesibilitas Pelayaran	80
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	73
	Indeks kepuasan Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Sarbagita	82.5
	Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Prosentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	38.58
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85

**Sasaran Strategis dan
INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026 adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal dengan didukung beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	1.1. Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan 1.2. Rasio Konektivitas Layanan Angkutan

	1.3. Persentase Aksesibilitas Pelayanan
--	---

2. Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	2.1. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional 2.2. Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan 2.3. Indek Kepuasan Layanan Angkutan Angkutan Umum Perkotaan di Sarbagita 2.4. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM

3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	3.1. Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik

4. Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	4.1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
Terwujudnya Kualitas Layanan Trasportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan	73		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	Indeks kepuasan Layananan Angkutan Umum Perkotaan di Sarbagita	82.5		Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya	50		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

	Menerapkan SPM		
--	----------------	--	--

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Prosentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	38.58	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75%	Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

4. Program Pengelolaan Pelayaran

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, dapat kami simpulkan bahwa;

- a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan sektor perhubungan.
- b. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan terakhir dengan Bapak Gubernur Bali Yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target
Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75%
Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
Prosentase Aksesibilitas Pelayaran	80
Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65
Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	73
Indek Kepuasan Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Sarbagita	82.5
Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Prosentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	38.58
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.58

- c. Hasil Akuntabilitas :

Capaian Kinerja Organisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75	50	100%
2	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0.86	0.86	100%
3	Prosentase Aksesibilitas Pelayaran	80	80	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
4	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65	65	100%
5	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73	73	100%
6	Indek Kepuasan Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Sarbagita	82.5	82.5	100%
7	Persentase Pelabuhaan Pengumpan Regional yang Operasinya Menerapkan SPM	80	50	100%
8	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	38.58	38.58	100%
9	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85	83.85	99,84%

Efektivitas anggaran

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran perubahan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 42.520.489.157,00 Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.564.106.408,00 atau 81.29%.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada tahun 2023 Total Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal yang dikelola sebesar Rp. 42.520.489.157,00 untuk membiayai 4 Program pendukung dengan 16 Kegiatan didalamnya yang tersebar di Sekretariat, Bidang dan UPTD. dengan rekapitulasi secara sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 23.899.467.802,00	Rp 25.277.010.974,00	Rp 23.522.883.176,00	93.06%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.208.154.763,00	Rp 15.760.426.203,00	Rp 9.619.707.201,00	61.04%

3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.010.614.840,00	Rp 1.010.614.840.00	Rp 967.581.958.00	95.74%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 472.437.140,00	Rp 472.437.140,00	Rp 453.934.073,00	96.08%
	Jumlah anggaran	Rp 37.590.674.545,00	Rp 42.520.489.157,00	Rp 34.564.106.408,00	81.89%

2. SARAN

Dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait untuk sinergitas pelaksanaan program, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan pameran terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk meningkatkan daya tarik ke masyarakat.
2. Dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
4. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan:

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparaturnya dan masyarakat luas
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

GUB. P. GUBERNUR BALI

S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PERHUBUNGAN

Dr. Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl. Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	75
		Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0,86
		Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75
2	Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Pencapaian Waktu Tempuh 2,5 jam/100 km dari KSP menuju jalan nasional	65
		Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73
		Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM	50
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	38.58
4	Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.899.467.802	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 12.208.154.763	APBD
3. Program Pengelolaan Pelayanan	Rp. 1.010.614.840	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 472.437.140	APBD

Bali, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



Pihak Pertama



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuaikan dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
	Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	25.277.010.974,00	100%	23.622.883.176,00	100%		Meaksanakan dan atau mengutamakan Kegiatan Dinas sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.	
1			Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.669.900,00	83,86%	29.383.722,00	100%	8 dokumen		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	21.423.600,00	100%	15.797.751,00	0,77	2 dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.236.300,00	100%	13.585.971,00	83,68	3 dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Gaji, Tunjangan dan Administrasi Penyediaan Perlengkapan Kantor	18.413.061.667,00	83,86%	17.301.893.818,00	83,97	1 dokumen		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.393.542.067	100%	17.286.503.518	93,98	1 tahun		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.519.500	100%	15.390.300	78,85	1 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	1.462.198.662	100%	1.128.701.211	77,69	7 dokumen		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	11.304.212	100%	10.262.000	90,78	1 tahun		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	549.716.000	100%	383.437.000	69,75	1 tahun		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	105.700.000	100%	104.809.500	99,16	1 tahun		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan doodaan Pengandaan yang disediakan	17.672.900	100%	13.952.670	78,07	1 tahun		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15.358.250	100%	14.386.350	93,67	1 tahun		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	752.243.190	100%	599.854.691	79,74	1 tahun		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuai dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
						KEU	KIN	KEU	KIN					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.894.898.300	100%	2 dokumen	1.880.297.200	99,16	3 dokumen			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan (Dihibahkan)	1.920.000.000	100%	15 unit	1.920.000.000	100,00	1 tahun			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22.875.800	100%	55 paket	20.557.200	89,86	55 paket			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54.122.500	100%	8 unit	39.740.000	73,43	8 unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.068.200	100%	3 dokumen	648.766.780	93,46	3 dokumen			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia dan siap pakai	3.162.000	100%	1 laporan	2.590.000	81,59	200 lembar			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	278.360.000	100%	1 laporan	241.532.360	86,77	1 tahun			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	410.534.200	100%	1 laporan	402.653.400	98,08	1 tahun			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	2.685.038.466	100%	3 dokumen	2.437.841.466	90,79	6 dokumen			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbiannya	1.488.182.695	100%	23 unit	1.259.391.175	84,63	1 tahun			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92.484.400	100%	45 unit	82.933.500	89,67	1 tahun			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1.104.371.360	100%	5 unit	1.095.516.790	99,20	5 unit gedung			
			Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	16.760.428.200,00	100%	0,88 Rasio	9.619.707.201,00	51,04	0,88 Rasio			
2			Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan Jalan	460.671.840,00	100%	2 Laporan	416.160.363,00	92,36	100 persen			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	341.431.440	100%	1 laporan	328.537.990	96,22	3600 kendaraan			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	109.140.400	100%	1 laporan	87.612.363	80,27	1 laporan			
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	63.808.100	76%	13 Laporan	39.698.330	73,85	100 persen			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	26.957.700	100%	8 laporan	22.161.930	82,21	8 rekomendasi			
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	26.651.400	100%	8 laporan	17.427.400	65,39	8 lokasi			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuai dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
				Penetapan Renoana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Renoana Umum Jaringan Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	166.296.100,00	100%	1 Laporan	99.014.485,00	63,35		
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	156.296.100	100%	1 laporan	99.014.485	63,35	1 paket	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	348.553.980		1 Laporan	336.716.460	96,87	3000 unit	
				Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksil yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksil yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	348.553.980	100%	10 unit	335.716.460	96,87	3000 unit	
			Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Simpang	2.229.274.186,00	100%		2.009.413.480,00	90,14		
3			Terwujudnya Transportasi yang lancar	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia	1.087.783.465	100%	387 unit	1.011.511.375	92,99	4 paket	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	1.141.490.721	100%	760 unit	997.902.115	87,42	1 tahun	
				Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Baragita	11.018.971.867,00	100%		6.308.318.596,00	48,17		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867	100%	4368 RIT	5.308.318.596	48,17	4368 RIT	Adanya Anggaran Perubahan yang tidak bisa di realisasikan, di karenakan belum adanya serah terima TMD secara asinkronisasi
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Prosentase Penoapatan waktu tempuh 2,5jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	1.606.149.180,00	100%		1.411.604.487,00	93,78		
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.505.149.130	100%	14 simpang	1.411.504.487	93,78	14 simpang	
				Program Pengelolaan Pelayaran	Perentase Pelabuhan Penjalman Regional yang Operasionalnya menerapkan	1.010.614.840,00	100%		987.681.968,00	95,74		
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pempun Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pempun Regional	871.047.840	100%	1 dokumen	853.040.800	97,93	2 dokumen	
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pempun Regional	Jumlah laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pempun Regional	139.567.000	100%	10 Laporan	114.541.158	82,07	1 tahun	
			Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	472.437.140,00	100%		463.994.073,00	96,08		
4			Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	472.437.140	100%	1 dokumen	453.934.073	96,08	1 dokumen	